

Media Komunikasi dan Inspirasi

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XXXVIII/Oktober - 2019

07 | Lima Tahun
Luaskan Akses
Pendidikan

18 | Komitmen Melaksanakan
Amanat UU Pemajuan
Kebudayaan

30 | Belajar Akuntansi
melalui Komik Digital

**KILAS BALIK
KINERJA
KEMENDIKBUD
2014-2019**



MAJU BER **5** TAHUN
SAMA

Daftar Isi

4 Salam Pak Menteri

Capaian Kemendikbud
2015-2019

**Untuk Kualitas
Pendidikan dan
Pemajuan Kebudayaan
yang Lebih Baik**

6

Revitalisasi
Pendidikan
Vokasi



**Untuk Tingkatkan
Daya Saing Bangsa Hadapi
Revolusi Industri 4.0**

10

**Capai Pendidikan
yang Berkeadilan
dengan Zonasi Pendidikan**

13

Penguatan
Pendidikan Karakter
**Fondasi dan Roh
Utama Pendidikan**

16

20 Digitalisasi Sekolah, Metode Pembelajaran
di Era Revolusi Industri 4.0
Rumah Belajar Dukung Pembelajaran Digital

22 Reformasi Tata Kelola Pendidikan
**Permudah Masyarakat Peroleh
Informasi dengan Layanan Elektronik**

24

Resensi
Buku



**Mengintip
Keberagaman Budaya
melalui Catatan
Perjalanan**

26

Kebudayaan
**Pemerataan
Kesejahteraan
untuk Semua Lapisan
Masyarakat Melalui
Kemajuan Budaya**

33

Bangga Berbahasa
Indonesia
**Mari Cermati
Lagi Penggunaan
Huruf Kapital**

Sapa Redaksi

Salah satu janji Presiden Jokowi ketika masa kampanye Pemilihan Presiden (pilpres) 2014 adalah membentuk kabinet profesional. Dari janji itu, usai dilantik menjadi presiden, terbentuklah Kabinet Kerja yang terdiri atas empat menteri koordinator dan 30 tiga puluh menteri.

Oktober 2019, Kabinet Kerja I telah sampai di penghujung periode. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di bawah arahan dua menteri, Anies Baswedan dan Muhadjir Effendy telah melaksanakan berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, yang merujuk pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Program-program tersebut telah memberikan sejumlah dampak positif bagi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan maupun kebudayaan.

Majalah JENDELA edisi kali ini menyajikan capaian kinerja Kemendikbud tahun 2015—2019 yang dirangkum sebanyak 18 halaman pada rubrik Fokus. Melalui rubrik ini, JENDELA menginformasikan capaian kinerja yang dilalui melalui enam program prioritas Kemendikbud, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Zonasi Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, dan Digitalisasi Sekolah.

Pada rubrik Resensi Buku kali ini redaksi mengulas buku "Crazy Litte Heaven: Pesona Kepingan Surga di Indonesia" yang ditulis oleh Mark Heyward. Buku ini bercerita tentang sebuah catatan perjalanan

seorang pria berkebangsaan Australia yang melintasi Borneo di Indonesia, dari Samarinda di timur ke Pontianak barat menggunakan perahu, jalan darat, dan berjalan kaki.

Rubrik selanjutnya, yaitu rubrik Kebudayaan. Kali ini JENDELA tampilkan informasi tentang International Forum for the Advancement of Culture (IFAC) yang merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN). Sajian ini dapat pembaca nikmati pada halaman 26 hingga 29.

Sementara itu pada rubrik Kajian, redaksi sajikan hasil kajian tentang pengembangan media komik digital akuntansi pada materi menyusun laporan rekonsiliasi bank untuk siswa SMK. Kajian ini ditulis oleh Yuliana, Siswandari, dan Sudyanto dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang redaksi tulis ulang dalam bentuk tulisan populer.

Sebagai sajian penutup, JENDELA juga hadirkan rubrik Bangga Berbahasa Indonesia. Rubrik Bangga Berbahasa Indonesia kali ini mengulas penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Pembahasan lebih lengkap dapat pembaca simak pada halaman 33. Serta pada halaman 34, redaksi suguhkan daftar kata-kata serapan bersama arti dan asal kata serta negara.

Semoga JENDELA edisi kali ini bermanfaat dan dapat menambah informasi serta pengetahuan pembaca. Akhir kata redaksi ucapkan selamat membaca. Salam.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Soeparto

Penanggung Jawab: Ade Erlangga Masdiana

Pemimpin Redaksi: Anang Ristanto

Redaktur Pelaksana: Ratih Anbarini

Staf Redaksi: Agi Bahari, Desliana Maulipaksi, Ryka Hapsari Putri, Dwi Retnawati, Denty Anugrahmawaty, Prima Sari, Anang Kusuma, Prani Pramudita, Dennis Sugianto, Intan Indriaswanti, Nur Widiyanto

Editor: Zainuddin, Sigit Supriyadi, M. Adang Syaripudin, Heri Nana Kurnia

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



 Kemdikbud.go.id

 [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI)

 [@kemdikbud_RI](https://twitter.com/kemdikbud_RI)

 [KEMENDIKBUD RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD_RI)

 [Kemdikbud.RI](https://www.instagram.com/Kemdikbud.RI)

 jendela.kemdikbud.go.id

 belajar.kemdikbud.go.id

Salam Pak Menteri

Tidak terasa perjalanan Kabinet Kerja Pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, selama lima tahun, berakhir. Selama kurun waktu itu, berbagai kebijakan dan program dilakukan, semata-mata untuk kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sesuai program Nawacita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan kebijakan dan program yang sesuai dengan visi Presiden.

Di bidang pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbud menerjemahkan amanat dalam Nawacita dengan sejumlah kebijakan. Mulai dari pengimplementasian Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tidak hanya terus memastikan penyaluran berjalan lancar, Kemendikbud juga melakukan sejumlah inovasi untuk mempermudah penerima KIP mencairkan dana bantuan.



Inovasi tersebut, di antaranya pada 2017, KIP yang sebelumnya hanya menjadi kartu identitas penerima dana PIP, diubah menjadi KIP-ATM, sehingga siswa penerima kartu dapat mengambil uang langsung dari mesin ATM pada bank-bank penyalur yang ditunjuk. Saya percaya cara ini memudahkan siswa dalam memanfaatkan dana PIP untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Tidak ketinggalan pula revitalisasi vokasi dijalankan untuk menyiapkan lulusan SMK yang berdaya saing tinggi, mampu berkompetisi di tingkat global, dan siap menghadapi revolusi industri 4.0. Di sini lain, kita juga ingin melahirkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Untuk itulah program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Di bidang kebudayaan, Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan akhirnya disahkan pada 2017. Peraturan ini mempertegas posisi kebudayaan sebagai ruh pembangunan Pendidikan nasional. Kita bersyukur, di akhir 2018 yang lalu dokumen strategi kebudayaan nasional diserahkan kepada Presiden. Dengan diteruskannya dokumen tersebut, sekarang Indonesia telah memiliki dasar kebijakan yang merujuk pada pemajuan kebudayaan di Indonesia.

Di periode ini, Kemendikbud juga memberlakukan kebijakan zonasi pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas. Karenanya, kebijakan zonasi tidak berhenti pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), namun berlanjut pada penataan dan pemerataan guru, infrastruktur, berbagi sumber daya, dan lainnya. Saya yakin dengan kebijakan ini, sebagian besar persoalan pendidikan bisa terjawab.

Perwujudan pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas itu juga dilakukan dengan menjalankan program digitalisasi sekolah. Ini merupakan terobosan baru di dunia pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengajaran. Digitalisasi sekolah memanfaatkan Rumah Belajar sebagai sarana pembelajaran abad 21 bagi pendidik dan peserta didik. Aplikasi gratis ini sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 192 ribu guru dan 485 ribu peserta didik.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengapresiasi seluruh pihak di luar Kemendikbud yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memajukan kebudayaan di Indonesia. Semoga kontribusi yang diberikan itu berbuah pahala dan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ingatlah bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. (*)



Capaian Kemendikbud 2015-2019

Untuk Kualitas Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan yang Lebih Baik

Selama masa Kabinet Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan sejumlah program prioritas. Program yang disusun tersebut merujuk pada Nawacita Kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2015–2019. Setidaknya ada enam program prioritas Kemendikbud yang dijalankan, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Zonasi Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, dan Digitalisasi Sekolah.

PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS Kemendikbud ini dijalankan untuk meningkatkan kualitas serta memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Indonesia. Mulai dari PIP yang dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, atau prioritas, untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Tidak hanya di daerah perkotaan, program ini juga menyasar daerah-daerah di pelosok, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Kedua, PPK merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong peran tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, untuk menumbuhkan nilai religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas kepada peserta didik. Pertumbuhan Gerakan PPK pada satuan pendidikan formal setiap tahunnya terus meningkat.

Begitu pula dengan kebijakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi yang semakin gencar dilakukan merupakan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing bangsa. Hal ini terlihat dari semakin banyak lulusan SMK yang dapat bersaing dengan lulusan sekolah kejuruan dari negara-negara lain.

Sementara itu, program Zonasi Pendidikan yang dilaksanakan sejak tahun 2017 bertujuan

untuk menghilangkan kastanisasi yang ada di lingkungan pendidikan. Hingga saat ini, zonasi memiliki berbagai dampak salah satunya yaitu melahirkan perhitungan kebutuhan dan distribusi guru di setiap zona pendidikan.

Di bidang kebudayaan, Undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan akhirnya disahkan. Dari sanalah selanjutnya dilakukan sejumlah kebijakan strategis untuk melaksanakan amanat dalam peraturan tersebut. Capaian pemajuan kebudayaan ditandai dengan terselenggaranya program Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di 34 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, dalam rangka menyiapkan sekolah memasuki era revolusi industri 4.0, Kemendikbud mengembangkan program Digitalisasi Sekolah. Alokasi dana pengembangan program ini disiapkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berupa BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja. Digitalisasi Sekolah telah resmi diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada September 2019 yang ditandai dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada sekolah dan gawai atau tablet kepada siswa.

Bagaimana perjalanan program dan kebijakan tersebut? Temukan jawabannya dalam rubrik Fokus yang redaksi hadirkan untuk pembaca setia Majalah JENDELA sebanyak 17 halaman. Selamat membaca. **(INT)**

Program Indonesia Pintar

Lima Tahun Luaskan Akses Pendidikan

Pertama kali diluncurkan pada November 2014, pemerintah mengalokasikan Rp4,32 triliun melalui program Indonesia Pintar (PIP) bagi 7,95 juta anak Indonesia agar tetap dapat mengenyam pendidikan di usia sekolah. Setiap tahun, anggaran yang disiapkan semakin bertambah demikian pula target penerimanya. Hingga akhir 2018, anggaran yang disiapkan mencapai Rp9,71 triliun dan telah disalurkan kepada 18,74 juta siswa. Dengan PIP, negara hadir mengupayakan setiap anak Indonesia dapat memperoleh haknya berada di ruang-ruang kelas.

PROGRAM INDONESIA Pintar (PIP) merupakan salah satu program bantuan pemerintah yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat. Di awal implementasi, bantuan diberikan berupa uang tunai kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Dana tersebut untuk membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan personal yang tidak dicakup oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS), seperti perlengkapan dan iuran sekolah, seragam, atau transportasi dari rumah ke tempat belajar.

Penerima PIP di jenjang sekolah dasar (SD) mendapatkan bantuan dana sebesar Rp450.000 per tahun, jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebesar Rp750.000 per tahun, dan jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar Rp1.000.000 per tahun. Dan untuk mendapatkan dana tersebut, siswa penerima bantuan harus datang langsung ke bank penyalur untuk melakukan pencairan.

KIP-ATM

Pertengahan tahun 2017/2018, mekanisme penyaluran dana PIP diubah. Bantuan tidak lagi diserahkan secara langsung, melainkan disalurkan melalui kartu KIP-ATM, yaitu kartu yang dikeluarkan oleh bank penyalur bagi siswa yang tercatat sebagai penerima bantuan. Dengan KIP-ATM, dana dapat diambil oleh siswa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat yang terdapat di daerahnya.

Perubahan mekanisme penyaluran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mendapati adanya hambatan dalam proses penyaluran dan pencairan dana PIP. Mekanisme pencairan yang harus dilakukan di bank penyalur membuat siswa penerima bantuan kesulitan dalam mencairkan dana bantuan, karena lokasinya yang berada jauh dari tempat tinggalnya. Tapi kini dengan KIP-ATM, siswa dapat mencairkan bantuan lebih cepat.

Pertengahan tahun 2017/2018, mekanisme penyaluran dana PIP diubah. Bantuan tidak lagi diserahkan secara langsung, melainkan disalurkan melalui kartu KIP-ATM, yaitu kartu yang dikeluarkan oleh bank penyalur bagi siswa yang tercatat sebagai penerima bantuan.

Apa kata mereka tentang PIP?

Bantuan pemerintah yang disampaikan lewat PIP telah membuka akses yang lebih luas bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Lewat majalah Jendela kali ini telah dirangkum beberapa testimoni siswa yang telah merasakan manfaat PIP.

Shintia, siswi SMAN 2 Balige

"(KIP) sangat membantu. Karena dengan cuma mama yang membiayai kami, jadi (KIP) bisa bantu melengkapi,"

Viones Algatri, siswi kelas XI SMA Plus Negeri 2 Banyuasin.

"Saya dari keluarga sederhana, ayah saya bekerja sebagai supir dan ibu saya tidak bekerja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan Program Indonesia Pintar. Terima kasih Pak Presiden atas Program Indonesia Pintar ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan saya. Dengan adanya program ini, tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tidak sekolah".

Zainuddin, SMA Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

"Uang PIP saya gunakan untuk membeli alat-alat tulis, perlengkapan sekolah, juga keperluan penunjang keikutsertaan saya di Olimpiade Sains Nasional dengan membeli buku-buku referensi geografi. Sebelumnya, orang tua saya harus datang ke bank terlebih dahulu, sekarang tidak perlu".

Bunga, Siswi SMK Dua Mei, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

"Uang PIP sekarang saya gunakan untuk bayar sekolah. Kalau dulu waktu SMP, uang PIP untuk membeli buku pelajaran dan sepatu,"

Aditya, SMAN 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

"Saya menggunakan bantuan dana PIP untuk biaya praktikum di sekolah".



Selama lima tahun melayani siswa dari keluarga ekonomi lemah, Program Indonesia Pintar (PIP) yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah mengalami sejumlah perubahan dan inovasi untuk kemudahan penggunaan.

2014

Diluncurkan pertama kali pada November oleh Presiden Joko Widodo. Siswa penerima PIP mendapat KIP sebagai tanda siswa berhak menerima dana PIP.

2015

Terdapat masalah dalam pendistribusian KIP karena persoalan pemutakhiran data. Presiden Joko Widodo meminta agar distribusi dipercepat.



Keberhasilan PIP dinilai lembaga survei nasional yang dirilis Januari 2019, menduduki peringkat kedua program paling menyentuh langsung kepada masyarakat, setelah Program Indonesia Sehat. Ke depan, target penerima PIP akan terus ditambah untuk memperkuat target pemerintah dalam penyiapan tenaga kerja berkompeten dan memperkuat program Wajib Belajar 12 Tahun.

Kemudahan pencairan dana dengan ATM diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai literasi finansial, khususnya mengenai pemanfaatan fasilitas perbankan. Dana pendidikan nontunai ini dapat digunakan untuk berbelanja keperluan belajar di toko yang ditunjuk bank atau di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin *electronic data capture* (EDC). Selain PIP, pemerintah mengintegrasikan berbagai bantuan sosial (bansos) lain secara nontunai, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Beras Sejahtera (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam satu kartu, yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).



2016

Tercatat penerima KIP di tahun 2016 sebanyak 19.221.903 siswa atau paling banyak di antara tahun-tahun perjalanan penyaluran KIP, termasuk mengalokasikan KIP kepada anak-anak yatim piatu, baik yang tinggal maupun di luar panti asuhan.

2017

Mekanisme penyaluran dana PIP diubah. Bantuan tidak lagi diserahkan secara langsung, melainkan disalurkan melalui kartu KIP-ATM, yaitu kartu yang dikeluarkan oleh bank penyalur bagi siswa yang tercatat sebagai penerima bantuan.

2018

Sepanjang tahun, Presiden Joko Widodo membagikan langsung kepada penerima KIP di banyak daerah di Indonesia. Presiden menyapa langsung para siswa untuk menanyakan persoalan pendidikan di masyarakat.

2019

Pada Januari 2019, PIP dinilai oleh lembaga survei nasional, peringkat kedua program paling menyentuh langsung kepada masyarakat, setelah Program Indonesia Sehat. Pada tahun yang sama, Mendikbud Muhadjir Effendy menginstruksikan agar mempercepat pencairan dana PIP dengan menggandeng sejumlah bank penyalur.

Saat ini semua penerima KIP memiliki nomor rekening tabungan Simpel. Simpel digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja sama dengan bank umum dan bank syariah. Bank penyalur KIP yang menjalin kerja sama dengan Kemendikbud adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk jenjang SD dan SMP dan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk jenjang SMA dan SMK. Dengan KIP-ATM tersebut, pengambilan dana PIP dapat dilakukan di ATM bank BRI dan BNI.

Kehadiran KIP melalui tabungan Simpel juga merupakan bagian dari amanah Kurikulum 2013 (K13), di mana selain program penguatan karakter dan juga literasi sekolah, kini juga diperlukan literasi keuangan sehingga siswa memahami pengelolaan keuangan.

Selain mengurangi anak putus sekolah, dana PIP ini juga dinilai mampu membantu pemerintah daerah mendukung program wajib belajar sembilan tahun. Kabupaten Klaten, misalnya, angka anak putus sekolah berkurang 60 persen pada 2018 atau 54 anak dari 136 anak di tahun sebelumnya.

Peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program prioritas ini sangat penting dan strategis terutama dalam hal validasi penerima PIP dan koordinasi dengan bank penyalur untuk pencairannya. Ke depan Kemendikbud akan mengembangkan sistem monitoring PIP secara daring (*online*) sehingga pengawasannya dapat dilakukan oleh berbagai pemanku kepentingan secara transparan, akuntabel, dan dalam waktu nyata (*real time*). (ALN)



Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Untuk Tingkatkan Daya Saing Bangsa Hadapi Revolusi Industri 4.0

Bonus demografi yang akan segera terjadi di Indonesia, menjadi perhatian khusus Kabinet Kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di pasar global. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dan menyongsong bonus demografi perlu dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.

REVITALISASI PENDIDIKAN vokasi dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, terampil, bermutu, dan relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus

berkembang. Revitalisasi pendidikan vokasi diproyeksikan untuk menyiapkan tambahan 58 juta tenaga kerja dengan keterampilan Abad ke-21 pada kurun 15 tahun mendatang. Targetnya, Indonesia

menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh dunia pada tahun 2030.

Dalam revitalisasi pendidikan vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki peran yang strategis. Kemendikbud melakukan berbagai program revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK), pendidikan khusus, serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Program-program Kemendikbud terkait revitalisasi pendidikan vokasi antara lain menambah jumlah guru produktif, meningkatkan kompetensi guru produktif, perbaikan sarana dan prasarana praktikum, sertifikasi keterampilan bagi guru dan siswa SMK, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan lain-lain.

Revitalisasi di SMK

Revitalisasi SMK dipayungi dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Hadirnya Inpres tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lulusan SMK. Inpres tersebut mengamanatkan Kemendikbud melakukan penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, kerja sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait, serta penyesuaian standar kompetensi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.

Sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2016, Kemendikbud menyusun peta jalan revitalisasi SMK. Selain itu pemenuhan kebutuhan guru produktif dan peningkatan kompetensi guru produktif juga dijalankan. Pemenuhan kebutuhan guru produktif dijalankan

dengan program keahlian ganda. Program keahlian ganda merupakan solusi yang paling tepat dijalankan, karena jumlah guru produktif masih sangat kurang sementara untuk melakukan pengadaan guru pegawai negeri sipil (PNS) tidak dapat dilakukan dengan cepat. Program keahlian ganda dilaksanakan dengan melakukan pelatihan kepada guru-guru normatif adaptif agar memiliki kompetensi sebagai guru produktif.

Untuk meningkatkan kompetensi guru produktif di SMK, Kemendikbud mendorong guru produktif memiliki sertifikasi keahlian sesuai bidangnya. Sejalan dengan hal itu, Kemendikbud bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengembangkan SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP – P1). Jumlah LSP – P1 terus ditambah dari tahun ke tahun. Tahun 2016, jumlahnya 321 lembaga, tahun 2017 meningkat menjadi 431 lembaga, tahun 2018 menjadi 837 lembaga, dan tahun 2019 jumlahnya menjadi 914 lembaga.

Kemendikbud juga memfasilitasi kerja sama SMK dengan DUDI. Kerja sama tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak, terutama lulusan SMK akan lebih mudah terserap oleh dunia kerja. Tahun 2016, sebanyak 26.206 SMK bekerja sama dengan DUDI. Tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi 34.116 SMK, tahun 2018 naik menjadi 40.052 SMK, dan tahun 2019 (per bulan Juli 2019) berjumlah 40.095 SMK.

Selain itu Kemendikbud juga memberikan bantuan untuk pengembangan *teaching factory* di SMK. *Teaching factory* adalah suatu

Program-program Kemendikbud terkait revitalisasi pendidikan vokasi antara lain menambah jumlah guru produktif, meningkatkan kompetensi guru produktif, serta perbaikan sarana dan prasarana praktikum.

Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, intelektual, mental, dan sensorik, harus diberikan keterampilan agar dapat mandiri.

konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi barang atau jasa yang mengacu pada standar an prosedur yang berlaku di dunia industri. Adanya *teaching factory* akan membuat lulusan SMK terbiasa bekerja mengikuti prosedur baku untuk menghasilkan barang atau jasa dengan standar yang sama dengan di dunia industri. Tahun 2016, jumlah *teaching factory* yang dibangun berjumlah 73 unit. Tahun 2017 meningkat menjadi 200 unit, tahun 2017 menjadi 228 unit, dan tahun 2019 meningkat menjadi 500 unit *teaching factory*.

Pendidikan Khusus

Untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Kemendikbud menggulirkan Program Revitalisasi Pendidikan Keterampilan/Vokasi di Satuan Pendidikan Khusus. Hal tersebut semakin menguatkan program keterampilan pada Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini karena prioritas utama bagi satuan pendidikan khusus adalah memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada program keterampilan atau vokasi kepada peserta didik penyandang disabilitas.

Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, intelektual, mental, dan sensorik, harus diberikan keterampilan agar dapat mandiri.

Mata pelajaran keterampilan ini telah diakomodir dalam Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus, di mana terdapat 20 mata pelajaran keterampilan.

Program-program Kemendikbud untuk revitalisasi vokasi pendidikan khusus antara lain meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik, dan pengembangan kewirausahaan. Selain itu Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

LKP juga memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing SDM Indonesia. Program-program Kemendikbud untuk meningkatkan peran LKP adalah program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Tujuan kedua program tersebut adalah membekali peserta didik yang belajar di LKP dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja serta mendorong tumbuhnya jiwa wirausaha. Selain itu berbagai inovasi yang dilakukan Kemendikbud antara lain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengajuan bantuan maupun proses pembelajaran, alih media bahan pembelajaran dalam bentuk buku elektronik, dan pengembangan keterampilan yang berbasis potensi atau kearifan lokal. **(WID)**

Capai Pendidikan yang Berkeadilan dengan Zonasi Pendidikan

Sistem zonasi dimulai sejak 2017. Kelahiran zonasi dilatarbelakangi beberapa permasalahan di dunia pendidikan, antara lain ketimpangan pendidikan antardaerah, belum meratanya persebaran sekolah, dan terciptanya kastanisasi dengan adanya pelabelan sekolah favorit dan nonfavorit. Zonasi pendidikan bertujuan untuk mencapai pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, baik pemerataan dari sisi kedekatan domisili siswa dengan sekolah, kemudahan akses pendidikan, maupun pemerataan guru berkualitas di semua sekolah.

SELAMA BERPULUH-PULUH tahun masyarakat terbiasa dengan pengelompokan sekolah favorit-nonfavorit dan sekolah unggulan-nonunggulan. Langgengnya sekolah favorit dan sekolah unggulan tidak lepas dari bagusnya input calon siswa yang mayoritas memiliki prestasi bagus. Sementara itu, di sekolah lain yang berpredikat nonunggulan, sebagian besar siswanya merupakan lulusan dari sekolah nonunggulan dengan nilai UN yang rendah pula.

Pemerintah, melalui sistem zonasi pendidikan, berupaya menghapus pengastan dan diskriminasi sekolah yang menjadikan penumpukan sumber daya manusia berkualitas di satu sekolah atau satu wilayah. Sistem zonasi menjadikan input siswa dalam satu sekolah lebih heterogen, baik prestasi akademis dan nonakademis, karakter, maupun sosial ekonomi keluarga siswa. Guru dan kepala sekolah dituntut lebih kreatif dan inovatif menangani siswa yang heterogen.

Zonasi pendidikan memiliki prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak mendapatkan pengalaman belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat karena dekatnya lokasi rumah dan sekolah. Sekolah berperan besar mengelola dan mengintegrasikan pengalaman belajar anak di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Dekatnya domisili peserta didik dengan sekolah memiliki sejumlah manfaat, di antaranya, efisiensi biaya transportasi dan efisiensi waktu perjalanan rumah-sekolah sehingga anak memiliki waktu lebih banyak untuk bermain dan belajar di lingkungan rumahnya. Hal itu juga akan mendorong meningkatnya partisipasi, peran, dan

“Pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB, tetapi untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, dan kualitas sarana prasarana. Semua itu akan ditangani berbasis zonasi.”

**Muhadjir Effendy,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

tanggung jawab orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan.

Keterlibatan dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik, akan makin menguat. Orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat akan makin mudah untuk berinteraksi dan bekerja sama untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik.

Manfaat Zonasi

Dalam permasalahan anak putus sekolah, pemerintah daerah dapat mendeteksi lebih dini anak putus sekolah ini melalui terintegrasinya data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kerja sama Kemendikbud dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam data nasional tercatat sebanyak 223.882 anak putus sekolah (Neraca Pendidikan Daerah, 2018). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah membuat sistem zonasi pendidikan dapat menurunkan angka anak putus sekolah secara signifikan.

Kebijakan zonasi pendidikan juga memantik peran kebudayaan yang mengakar dan berkembang di lingkungan masyarakat. Berbagai aktivitas kebudayaan dapat tetap hidup dan berperan besar memberikan pengalaman dan pembelajaran bermakna bagi pembentukan karakter anak. Aktivitas kebudayaan diharapkan dapat menumbuhkan cinta dalam diri siswa pada daerah tempat tinggalnya. Siswa tidak melupakan identitas dan jati dirinya sebagai individu yang tumbuh besar di wilayah itu.

Selain itu, zonasi pendidikan juga mendorong sekolah-sekolah untuk saling berbagi

sumber daya pendidikan, seperti fasilitas laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, serta sarana dan prasarana lain yang dapat dipergunakan bersama antarsekolah dalam satu zonasi. Sebagian besar sarana dan prasarana sekolah adalah barang milik negara yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) sehingga pemanfaatannya tidak hanya oleh satu sekolah saja. Sekolah harus membuka diri dan mendorong pemanfaatan fasilitas secara bersama-sama yang tentunya disertai pengelolaan yang baik dan transparan.

Zonasi juga memungkinkan berbagi sumber daya guru. Selama ini banyak guru menumpuk di sekolah favorit sehingga sekolah nonfavorit kekurangan guru berkualitas. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan akan mengeluarkan kebijakan pertukaran guru sesuai dengan kebutuhan. Guru di sekolah favorit dapat ditugasi mengajar di sekolah nonfavorit. Begitu juga sebaliknya, guru-guru di sekolah nonunggulan dapat mengajar di sekolah unggulan. Kualitas proses pembelajaran akan ditingkatkan melalui pelatihan guru dalam zonasi yang berfokus pada masalah dan kebutuhan tiap-tiap zonasi.

Pada tahun 2019 Kemendikbud, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), telah mengembangkan laman zonasi pendidikan di semua daerah se-Indonesia yang terintegrasi dalam sistem yang dapat diakses bersama, yakni zonasi.kemdikbud.go.id. Pemangku kepentingan pendidikan, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat melihat peta zona tiap-tiap daerah, kondisi siswa yang akan lulus, ketersediaan daya tampung, jumlah satuan pendidikan dalam satu zona, kebutuhan guru,

Aplikasi atau laman zonasi pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan rujukan pemerintah untuk melakukan rotasi dan distribusi kebutuhan guru di sekolah. Hal itu akan mempermudah pembuatan kebijakan dan pemberian bantuan anggaran sesuai dengan prioritas.

Capaian Program Zonasi:

1. Penerbitan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengatur ketentuan PPDB dengan sistem zonasi.
2. Membentuk Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan Tahun 2019 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 248/P Tahun 2019.
3. Sudah ditetapkan 2.580 zona pendidikan di seluruh kabupaten/kota/provinsi.
4. Pengembangan laman zonasi.kemdikbud.go.id yang memuat: peta zona pendidikan; data siswa yang akan lulus; daya tampung sekolah; jumlah satuan pendidikan tiap zona; kebutuhan guru, sarana dan prasarana; prioritas pembinaan; dan data intervensi program dan pendanaan.

Dampak Kebijakan Zonasi:

1. Melahirkan perhitungan kebutuhan dan distribusi guru setiap zona pendidikan.
2. Pemberian bantuan lebih mudah ditetapkan dan lebih tetap sasaran.
3. Pemerintah daerah lebih mudah menetapkan program kegiatan peningkatan mutu pendidikan.
4. Penumpukan SDM berkualitas dalam satu wilayah zonasi dapat dihindari.

sarana dan prasarana, prioritas pembinaan, dan intervensi program dan pendanaan.

Balitbang merumuskan integrasi data dan informasi pendidikan dan kebudayaan ke dalam sistem zona aktivitas pendidikan-kebudayaan-kebahasaan, yaitu melalui zonasi mutu pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan zonasi pendidikan dan kebudayaan dikembangkan dengan tiga strategi, yakni strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan (integrasi pembangunan); strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten-kota-provinsi, sampai dengan pusat sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya; serta strategi pembangunan pendidikan yang berkesinambungan dari tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.

Untuk mencapai pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan, Balitbang menyusun dan mengembangkan tiga tahapan analisis yang saling terkait dengan penyusunan zona dan pengelolaan pendidikan berbasis zona. Tahapan tersebut adalah tahap klasifikasi,

tahap peningkatan kapasitas, serta tahap pemantauan.

Aplikasi atau laman zonasi pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan rujukan pemerintah untuk melakukan rotasi dan distribusi kebutuhan guru di sekolah. Pemenuhan ruang kelas juga dapat dihitung dan dipetakan berdasarkan aplikasi zonasi pendidikan. Hal itu akan mempermudah pembuatan kebijakan dan pemberian bantuan anggaran sesuai dengan prioritas.

Penetapan Zona Pendidikan

Pada awalnya ditetapkan 1.927 zona dari 2.916 satuan pendidikan. Setelah adanya koordinasi dengan kabupaten/kota dan provinsi, ditetapkan 2.578 zona pendidikan. Tahap penentuan zonasi diawali dengan penentuan jumlah zona SMA dan SMA terpilih. Dalam penentuan wilayah zonasi diperhatikan pula jarak SMA lain. Zonasi SMA kemudian dikoreksi dengan sebaran SMP di kabupaten/kota. Zonasi SMA juga dikoreksi dengan sebaran SD di kabupaten/kota. Pada tahap akhir, hasil zonasi SMA dikoreksi dengan sebaran SMP dan SD di kabupaten/kota. **(DES)**

Penguatan Pendidikan Karakter

Fondasi dan Roh Utama Pendidikan

Pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan bangsa, tidak dapat dipisahkan dari karakter manusia itu sendiri. Selain unggul dalam keterampilan dan pengetahuan, generasi unggul harus memiliki karakter kuat. Di sinilah pentingnya Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

PENGUATAN PENDIDIKAN Karakter (PPK) dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan generasi emas 2045 yang berakal cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta berjiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan karakter sesungguhnya bukanlah suatu kebijakan baru, karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter di sekolah sudah menjadi gerakan nasional.

Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk memastikan agar proses pembudayaan nilai-nilai karakter berjalan dan berkesinambungan. Masih diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan bertumpu pada kearifan lokal untuk menjawab tantangan zaman yang makin kompleks, mulai dari persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa sampai kepada persaingan global.

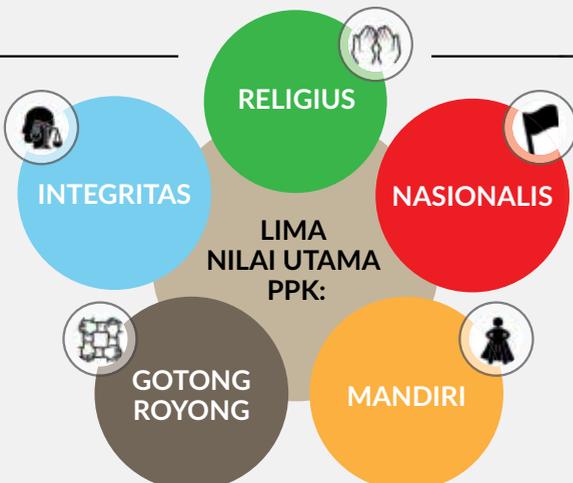
Dalam mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sistem pendidikan nasional, kebijakan PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama dari PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai ini ingin ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah serta di masyarakat.

PPK lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian, berupa individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual dan keilmuan.

PPK ini sendiri bertujuan untuk membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dan tujuan yang ketiga adalah merevitalisasi dan memperkuat

Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berakal cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta berjiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.



Pertumbuhan Gerakan PPK pada Satuan Pendidikan Formal setelah dikeluarkannya kebijakan Penumbuhan Budi Pekerti di sekolah:



potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan.

Pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) di sekolah. Pertumbuhan gerakan PPK pada satuan pendidikan formal sejak kebijakan ini diluncurkan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, 542 sekolah ditunjuk sebagai percontohan PPK.

Angka ini meningkat pada tahun berikutnya menjadi 64.213 sekolah atau sebesar 29,32% dari jumlah sekolah yang ada. Pertumbuhan pesat terjadi pada 2018 hingga mencapai 86,14%, atau sebanyak 188.646 sekolah. Pada tahun 2019, seluruh sekolah, yaitu 218.989 sekolah, telah mendapatkan intervensi serta telah menerapkan PPK.

Pencapaian ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Kebijakan tentang pendidikan karakter tersebut mendorong peran tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menumbuhkan nilai-nilai utama PPK, yang dikembangkan dengan

nilai-nilai kearifan lokal dan kreativitas sekolah.

Ketiga elemen ini harus saling bekerja sama karena masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan dari program PPK. Sekolah sebagai rumah dan arus utama gerakan PPK perlu didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbudaya sehat dan positif sebagai satu kesatuan ekosistem yang strategis dan berkelanjutan.

Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Kemendikbud dalam rangka menunjang program PPK. Kegiatan tersebut di antaranya adalah Lomba Gugus Unggul dan Festival Penggalang Ceria, Kawah Kepemimpinan Pelajar, Saya Anak Antikorupsi, Agen Saya Perempuan Antikorupsi, Menumbuhkan Jiwa Cinta Laut melalui Kurikulum Muatan Kemaritiman, serta program untuk mengembangkan karakter kesiagaan bencana.

Dengan berbagai program yang dijalankan oleh Kemendikbud tersebut, diharapkan generasi unggul yang terampil dan memiliki karakter kuat akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Dengan demikian, generasi penerus bangsa akan mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. **(ANK)**

Komitmen Melaksanakan Amanat UU Pemajuan Kebudayaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy pernah menyampaikan keinginannya agar kebudayaan Indonesia menjadi nafas dari kelangsungan hidup bangsa, menjadi darah kepribadian, menjadi mentalitas, dan nilai-nilai kebangsaan anak didik kita. Hal tersebut terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

MELALUI UNDANG-UNDANG ini, maka perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan dapat berjalan lebih optimal. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus.

Undang-undang pemajuan kebudayaan menjadi pendorong bagi terbitnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Semakin cepat terbitnya regulasi di bawahnya maka pemajuan budaya di Indonesia dapat segera terwujud karena kesadaran untuk memajukan budaya memang harus dimiliki oleh seluruh pihak.

Pemajuan kebudayaan mengonsolidasikan program pembangunan di bidang

kebudayaan lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pelibatan publik dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan menjadi hal yang tak kalah penting. Melalui keterlibatan Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, Majelis Adat, Komunitas, dan masyarakat lainnya; ruang-ruang publik akan lebih berdayaguna untuk mendukung pemajuan budaya.

Sebagai bagian dari pengimplementasian UU Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud mendorong pemerintah daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang berisi data inventarisasi obyek pemajuan kebudayaan di daerah. Hingga 2018, sebanyak 339 pemerintah daerah yang telah menyerahkan dokumen PPKD kepada Kemendikbud.

Menindaklanjuti PPKD itu, Kemendikbud kemudian melaksanakan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) yang bertujuan terbentuknya agenda-agenda pokok dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kebudayaan selama 20 tahun ke depan. KKI melahirkan dokumen strategi kebudayaan yang diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Upaya lainnya yang dilakukan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan tata kelola kebudayaan adalah dengan membentuk platform Indonesiana. Indonesiana adalah suatu mekanisme pengelolaan terpadu atas festival atau kegiatan budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan didukung oleh Pemerintah Pusat, serta dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam satu wadah kerja bersama.

Perkembangan Kebijakan Kebudayaan oleh Kemendikbud:

Di tahun 2014

belum ada dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) terkait UU pemajuan kebudayaan.

Maret 2018

kegiatan program pemajuan kebudayaan disosialisasikan.



Pada Maret 2019, 34 provinsi berhasil menyelesaikan dokumen PPKD.



Pada September 2019, 339 dari 514 dokumen PPKD berhasil diselesaikan.

UU Pemajuan Kebudayaan:

Undang-undang pemajuan kebudayaan mensyaratkan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan (PPK) yang berisi kondisi dan permasalahan nyata di daerah masing-masing beserta tawaran solusinya.



PPK itu harus disusun oleh masyarakat. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap tidak sah oleh negara.



Dampak keterlibatan masyarakat dalam penyusunan PPK adalah masyarakat memiliki kebudayaan di masing-masing daerahnya sehingga masyarakat terlibat aktif memajukan kebudayaan dan tercipta ketahanan budaya nasional.

Pada tanggal 7-13 Oktober 2019 Kemendikbud mengadakan Pekan Kebudayaan Nasional 2019 (PKN) di tingkat pusat dengan tema "Indonesia Bahagia". Acara ini diselenggarakan di Istora Senayan dan Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Pekan kebudayaan juga dilakukan di daerah pada periode April-September 2019. Setidaknya ada lima kegiatan utama dalam Pekan Kebudayaan Nasional, yaitu kompetisi daerah, kompetisi nasional, konferensi pemajuan kebudayaan, ekshibisi kebudayaan, dan pertunjukan karya budaya bangsa.

Sebelumnya, Kemendikbud menyelenggarakan Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) di Bumi Perkemahan Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 21-25 Juli 2019. Sebanyak 133 kelompok lolos seleksi dengan total peserta 589 orang. Satu kelompok terdiri dari 3-5 peserta. Seluruh kelompok dibimbing tim fasilitator yang bertugas mendorong diskusi agar kelompok berhasil menyusun proposal, memberi inspirasi dan perspektif baru dalam upaya pemecahan tantangan pemajuan kebudayaan melalui bentuk-bentuk purwarupa/aktivasi inisiatif sosial tertentu. Gagasan yang telah dipertajam lewat bimbingan ini dipresentasikan di hadapan juri pada waktu kemah.

Salah seorang peserta, Indah Nur Zahra merasakan manfaat Kemah Budaya Kaum Muda. Selama ini ia berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan budaya bersama tim. "Ide kami dinilai pihak fasilitator terlalu idealis. Nah di sini kami diajari bagaimana caranya budaya itu bisa menghasilkan uang. Seru!" kata Indah. **(DLA)**

Digitalisasi Sekolah, Metode Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0

Rumah Belajar Dukung Pembelajaran Digital

Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak dapat terhindarkan, termasuk di dunia pendidikan. Pendidikan dan teknologi informasi seharusnya sejalan guna terciptanya pendidikan yang berkualitas. Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Program Digitalisasi Sekolah. Aplikasi Rumah Belajar sebagai salah satu produk pembelajaran digital pun turut mendukung pelaksanaan Program Digitalisasi Sekolah.

DIGITALISASI SEKOLAH merupakan terobosan baru di dunia pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengajaran. Digitalisasi Sekolah dapat mempermudah proses belajar mengajar karena siswa dapat mengakses semua bahan ajar ataupun bahan ujian dalam jaringan.

Peluncuran Program Digitalisasi Sekolah dilakukan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada 18 September 2019. Saat peluncuran di Kabupaten Natuna, Kemendikbud membagikan tablet kepada 1.142 siswa yang terdiri dari 508 siswa kelas 6 SD, 303 siswa kelas 7 SMP, 331 siswa kelas 10 (228 siswa SMA dan 103 siswa SMK). Dalam tablet tersebut, telah diunduh aplikasi Rumah Belajar dari Pusat Teknologi dan Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Kemendikbud.

Aplikasi ini menyediakan delapan fitur utama yaitu sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan kelas maya.

Rumah Belajar merupakan pengembangan portal yang diluncurkan Pustekkom pada 15 Juli 2011. Melalui aplikasi ini diharapkan sekolah yang berada di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana yang diperoleh sekolah di daerah perkotaan. Selama ini, banyak sekolah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sulit dijangkau secara langsung karena kondisi geografisnya. Dengan ketersediaan aplikasi pembelajaran berbasis internet seperti Rumah Belajar, mereka bisa lebih cepat mengikuti pembelajaran seperti anak-anak di daerah perkotaan.



Selain pemberian gawai berupa tablet, Kemendikbud juga memberikan sarana pembelajaran TIK berupa PC-Server, laptop, LCD, router dan eksternal hardisk. Bantuan tersebut diberikan kepada 38 unit sekolah di Kabupaten Natuna, yang terdiri dari 25 SD, 9 SMP, 3 SMA dan 1 SMK.

Di luar Kabupaten Natuna, Kemendikbud juga memberikan bantuan sarana pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan tablet melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah



(BOS) Kinerja kepada 5.987 sekolah dan 692.101 siswa. Kemudian melalui BOS Afirmasi, bantuan TIK diberikan untuk 31.387 sekolah dan 1.049.433 siswa.

Secara total, saat ini baru sekitar 1,7 juta siswa dan 37 ribu sekolah yang mendapatkan bantuan TIK dalam Program Digitalisasi Sekolah. Kemendikbud merencanakan tahun depan bisa meningkatkan kebutuhan yang berlipat, sehingga diharapkan dua atau tiga tahun ke depan sekolah-sekolah di Indonesia sudah menggunakan platform digital untuk proses belajar mengajar dan mendukung proses belajar yang konvensional.

Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan, dengan digulirkannya Digitalisasi Sekolah, bukan berarti proses belajar konvensional tidak berlaku, tetapi tetap penting. Karena tatap muka antara siswa dengan guru masih menjadi cara yang paling baik. Pembelajaran tatap muka merupakan cara yang paling tepat untuk mendidik anak terutama dalam rangka membentuk karakter siswa.

Ke depan, Program Digitalisasi Sekolah akan diperluas di 34 provinsi yang sekolahnya berada di desa tertinggal dan sangat tertinggal (afirmasi). Digitalisasi Sekolah juga akan diperluas untuk sekolah yang memiliki rapor mutu dan nilai ujian nasional serta indeks kinerja daerahnya

mengalami pertumbuhan atau peningkatan selama dua tahun terakhir. Diharapkan, Digitalisasi Sekolah dengan penggunaan dan pemanfaatan TIK dapat mempercepat akses pelayanan pendidikan khususnya di wilayah-wilayah pinggiran.

Program Digitalisasi Sekolah merupakan terobosan baru yang memanfaatkan perkembangan TIK untuk mempermudah proses belajar mengajar. Guru dan siswa menjadi semakin mudah mengakses bahan ajar. Selain itu, komunitas guru bisa bekerja sama membuat materi bahan ajar digital atau membuat tes ujian harian secara bersama-sama dalam luar jaringan (*offline*) maupun dalam jaringan (*online*).

Kemendikbud tidak hanya akan mendorong siswa – siswa untuk pandai menggunakan gawai dalam proses pembelajaran tetapi juga menuntut peningkatan kompetensi guru di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Guru adalah ujung tombak dari keberhasilan program digitalisasi sekolah guna mempercepat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kunci keberhasilan program digitalisasi sekolah ada pada guru, sehingga kompetensi guru dituntut menjadi lebih baik. Guru perlu terus belajar baik belajar bersama instruktur, belajar sendiri, atau belajar bersama rekan sesama guru.

Di era 4.0, guru harus menguasai berbagai sumber yang bisa digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar, namun harus menguasai sumber-sumber di mana anak-anak bisa belajar, dan mengarahkan anak-anak agar bisa belajar dari sumber apapun. Dengan begitu dapat dikatakan guru berfungsi sebagai pernghubung sumber belajar atau *resorce linker*.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru tersebut, Kemendikbud melalui Pustekkom memiliki program PembaTIK. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik bidang TIK untuk pembelajaran. Dalam program ini, Pustekkom menggabungkan program PembaTIK sekaligus seleksi Duta Rumah Belajar. Peserta yang menjadi duta rumah belajar merupakan guru yang terbaik di provinsi dan berhasil masuk seleksi ke level 4. Melalui duta belajar ini diharapkan pengguna aplikasi pembelajaran terus meningkat sehingga proses digitalisasi sekolah berjalan dengan baik dan lahir generasi – generasi yang unggul. **(RWT)**

Reformasi Tata Kelola Pendidikan

Permudah Masyarakat Peroleh Informasi dengan Layanan Elektronik

Sebagai upaya untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengembangkan berbagai layanan elektronik. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan amanah presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

DI LINGKUNGAN Kemendikbud, SPBE dikembangkan menjadi Layanan Publik Berbasis Elektronik (LPBE) dan merupakan portal layanan publik yang terintegrasi untuk memudahkan pengguna, dalam hal ini pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan, untuk mengakses layanan pemerintah, mengintegrasikan proses bisnis, data, layanan SPBE, dan menerapkan keamanan SPBE. Layanan elektronik pendidikan ini dinamakan Zonasi Pendidikan dan dapat diakses pada laman zonasi.kemdikbud.go.id.

Beberapa layanan utama yang terdapat pada portal Zonasi Pendidikan di antaranya Peta Zonasi Sekolah dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Layanan Sim Penataan dan Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan (Sim Rasio) dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), dan Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas).

Dapodik sendiri saat ini telah memberikan dampak besar sebagai dasar untuk peserta ujian nasional jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan

Zonasi Pendidikan

zonasi.kemdikbud.go.id

Merupakan Layanan Publik Berbasis Elektronik (LPBE) dan portal layanan publik yang terintegrasi untuk memudahkan pengguna, dalam hal ini pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan, untuk mengakses layanan Kemendikbud.

Neraca Pendidikan Daerah

npd.data.kemdikbud.go.id

Merupakan ikhtiar Kemendikbud untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi dan capaian indikator pendidikan suatu provinsi/kabupaten/kota. Pada tahun 2019, NPD tersedia dalam bentuk aplikasi android. NPD dilengkapi dengan Buku Panduan Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah untuk Pembangunan Pendidikan Indonesia.

Data Pokok Pendidikan

dapodik.data.kemdikbud.go.id

Merupakan sebuah sistem pendataan pendidikan berskala nasional yang terpadu, akurat, terpercaya, dan terkini. Pada tahun 2019, Dapodik mulai melakukan pengumpulan dan integrasi pada data Kebudayaan dan Bahasa.

Neraca Pendidikan Daerah merupakan ikhtiar Kemendikbud untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi dan capaian indikator pendidikan di daerah. NPD diterbitkan sebagai bahan masukan bagi daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

(SMK). Dapodik adalah sebuah sistem pendataan pendidikan berskala nasional yang terpadu, akurat, terpercaya, dan terkini.

Dapodik merupakan konsep pengelolaan data pendidikan yang bersifat relasional dan longitudinal. Artinya keberadaan Dapodik diharapkan dapat menjaga arah program pembangunan pendidikan, mempermudah penyusunan perencanaan dan melakukan monitoring, serta sebagai alat evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran.

Tahapan integrasi Dapodik sendiri sudah dimulai sejak tahun 2014, dengan dilakukannya integrasi pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian dilanjutkan dengan integrasi data pada jenjang PAUD dan Dikmas pada tahun 2015. Keseluruhan data terus mengalami pemutakhiran sampai dengan hari ini. Pada tahun 2019, Dapodik mulai melakukan pengumpulan dan integrasi pada data kebudayaan dan bahasa.

Dapodik saat ini sudah dapat diakses secara daring melalui laman dapodik.data.kemdikbud.go.id, dan seperti sudah disinggung sebelumnya, Dapodik juga terintegrasi di dalam portal Zonasi Pendidikan. Dapodik pun telah dimanfaatkan untuk membuat perencanaan dan penganggaran untuk tahun depan serta memudahkan evaluasi data pembangunan pendidikan, misalnya dalam hal pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Layanan berbasis elektronik unggulan Kemendikbud lainnya yang terus dikembangkan pada tahun 2019 adalah Neraca Pendidikan Daerah. Neraca Pendidikan Daerah merupakan ikhtiar Kemendikbud untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi dan capaian indikator pendidikan suatu provinsi/kabupaten/kota. NPD ini diterbitkan sebagai bahan masukan bagi daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

NPD berisi anggaran pendidikan yang dialokasikan, indeks pembangunan manusia, data pokok pendidikan, dan indikator mutu yang menjelaskan situasi dan kondisi pendidikan di daerah. Indikator tersebut antara lain kompetensi dan kualifikasi guru, kondisi ruang kelas, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni, jumlah siswa putus sekolah dan mengulang, status akreditasi, capaian Ujian Nasional (UN), dan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN).

Selain versi cetak, pada tahun 2018 NPD juga dibuat dalam versi daring yang dapat diakses pada laman npd.data.kemdikbud.go.id. Keunggulan versi daring ini adalah, selain dapat mengunduh versi cetak, pengguna dapat membandingkan indikator NPD antardaerah, baik dalam provinsi, maupun lintas provinsi. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Pada tahun 2019, NPD tersedia dalam bentuk aplikasi android. NPD dilengkapi dengan Buku Panduan Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah untuk Pembangunan Pendidikan Indonesia. Melalui NPD berbasis android, masyarakat publik dan pemangku kepentingan pendidikan daerah dapat mengakses, mengunduh, melakukan perbandingan data, dan melihat rekomendasi kebijakan beserta contoh praktik baik dari telepon pintar berbasis android. NPD versi android diluncurkan pada saat Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) bulan Februari 2019.

Bersamaan dengan peluncuran tersebut, masyarakat diperkenalkan pada sebuah game atau permainan Simulasi Penganggaran Pendidikan Daerah. Dengan mengakses laman npd.kemdikbud.go.id/simulasi/ masyarakat dapat terlibat langsung dalam simulasi penyusunan anggaran dengan memosisikan diri sebagai Kepala Daerah. Melalui permainan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami berbagai tahapan serta pertimbangan dalam menyusun prioritas anggaran pendidikan di daerahnya. **(PPS)**

Mengintip Keberagaman Budaya melalui Catatan Perjalanan

Setiap mendengar kata Indonesia, tidak jarang hal yang terlintas di pikiran adalah keindahannya. Tidak hanya keindahan alam, tetapi juga budaya dan sastra. Namun, tidak banyak penulis yang menceritakan keindahan tersebut.

MARK HEYWARD, seorang pria berkebangsaan Australia, menulis buku berjudul "Crazy Little Heaven: Pesona Kepingan Surga di Indonesia" yang berisi sebuah catatan perjalanan mengenai perjalanan melintasi Borneo di Indonesia, dari Samarinda di timur ke Pontianak Barat menggunakan perahu, jalan darat, dan berjalan kaki.

Buku ini terdiri dari tujuh bagian, masing-masing bab mengulas catatan perjalanan setiap harinya secara mendalam. Pada bab satu, Mark membahas mencari Borneo, bagian dua membahas jalanan terbuat dari air, bagian tiga mengenai pemburu rupiah, bagian empat seputar jam karet, hingga bab tujuh membahas tentang cinta dan karaoke. Pembaca akan diajak untuk ikut merasakan

petualangan penulis mulai dari masa kecilnya di Tasmania hingga kehidupannya di Kalimantan. Mark menulis dengan lengkap dan detail tentang penjelajahan Borneo pada tahun 1994.

Buku ini cocok dibaca siapa saja dari semua kalangan. Penulis pawai dalam pemilihan diksi serta memiliki gaya khas dalam menuturkan setiap apa yang dialaminya. Pembaca seperti diajak berada pada saat penulis mengalami pengalaman itu sendiri. **(RWT)**



Judul	: Crazy Little Heaven: Pesona Kepingan Surga di Indonesia
Pengarang	: Mark Heyward
Tahun Terbit	: 2013
Halaman	: xxii + 306 hlm.; 25 cm
Bahasa	: Indonesia
Jenis Sampul	: Sampul Lunak



Jika ingin mengetahui informasi selengkapnya mengenai koleksi ini, kunjungi laman berikut dengan memindai kode QR berikut. Dapat juga datang langsung ke Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB dan Sabtu 08.00 s.d. 14.00 WIB

Koleksi Jurnal Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Perpustakaan Dikbud setiap tahunnya melanggan sejumlah jurnal elektronik internasional maupun milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Masyarakat umum, termasuk anggota perpustakaan Dikbud dapat mengakses jurnal-jurnal tersebut secara gratis. Beberapa jurnal yang dilanggan tersebut adalah:



Jurnal Elektronik Internasional

- Review of Educational Research
- Educational Evaluation and Policy Analysis
- Journal of Teacher Education
- World Archeology
- Studies in Science Education

Untuk daftar lebih lengkap, silakan kunjungi laman ini dengan memindai kode QR berikut.



Jurnal Elektronik Kemendikbud

- Amerta
- Berkala Arkeologi
- Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
- Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan
- Kekepot

Untuk daftar lebih lengkap, silakan kunjungi laman ini dengan memindai kode QR berikut.



Untuk permohonan akses Jurnal Elektronik Internasional, pemohon dapat mengirimkan surel ke perpustakaan@kemdikbud.go.id dengan format:

- Nama
- Pekerjaan
- Institusi
- Tuliskan subjek Permohonan
- Username dan Password Akses E-Journal



Pemerataan Kesejahteraan untuk Semua Lapisan Masyarakat Melalui Kemajuan Budaya

Di tengah semaraknya Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) yang mengangkat tema “Indonesia Bahagia”, diselenggarakan pula *International Forum for the Advancement of Culture (IFAC)*, sebuah forum internasional yang bersifat *people-to-people*. Forum kolaborasi internasional ini berlangsung di Jakarta pada 10 s.d 13 Oktober 2019.

I FAC ADALAH sebuah *platform* kolaborasi antarmasyarakat di seluruh dunia untuk memperkuat upaya global dalam pengarusutamaan budaya dengan penekanan khusus pada dampak kebudayaan terhadap kesejahteraan. IFAC dilatarbelakangi oleh *World Culture Forum (WCF)* yang dirancang sebagai *platform* antarpemerintah di seluruh dunia untuk menetapkan agenda pengarusutamaan budaya pada proses pembuatan kebijakan di seluruh negara.

Walau WCF telah dicanangkan, muncul kebutuhan akan jaringan internasional yang didasari pada interaksi antarmasyarakat. Oleh karena itu IFAC digagas berdasarkan pada interaksi antarmasyarakat yang dapat memelopori agenda organik baru pengarusutamaan budaya dari bawah. IFAC dirancang untuk menghasilkan keberagaman pandangan dan agenda bersama tentang pengarusutamaan budaya,

Berikut adalah pembicara dalam sesi acara IFAC, di antaranya:

1. Subtema I



Harry Waluyo
Global Network of Facilitator for ICH-UNESCO in the Asia-Pacific Region



Alison Heritage
Heritage Science Officer, ICCROM

2. Subtema II



Anbita Nadine Siregar
Founder of Generation Girl



Biyanto Rebin
Chair of Wikimedia Indonesia

3. Subtema III



Max Binur
Curator of Cultural Arts and Documentary Films, Papua



Arief Yudi Rahman
Director of Jatiwangi art Factory

4. Subtema IV



Felencia Hutabarat
Secretary General of Coworking Indonesia, Managing Director & Cofounder of kekini Coworking Space



Wen Tiejun
Professor

5. Subtema V



Lalitia Apsari
Idea Curator



Wafa Taftazani
Country Strategic Partnership Manager (Youtube), Google

6. Subtema VI



Rizka Raisa Fatimah Ramli
Illustrator, Winner of UNICEF and Comics Uniting Nations' Comic Contest 2019



Monika Irayati
Founder Erudio Indonesia

dengan penekanan khusus pada dampak kebudayaan terhadap kesejahteraan. IFAC didasarkan pada gagasan bahwa pengarusutamaan budaya memerlukan inisiatif masyarakat untuk memajukan ekspresi budaya mereka. Hal ini merupakan peran masyarakat untuk memperkaya budaya di luar batas, sedangkan peran pemerintah adalah untuk mengarusutamakan budaya di semua sektor pembuatan kebijakan.

IFAC diselenggarakan dengan harapan bahwa agar budaya menjadi pendorong dan penggerak pembangunan berkelanjutan, masyarakat harus memberdayakan budaya mereka untuk menyelesaikan tantangan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Mengetengahkan tema “Kemajuan Budaya untuk Kesejahteraan Semua” (*Advancement of Culture for the Well-Being of All*), IFAC terdiri dari serangkaian acara yang menginspirasi, gelar wicara dan diskusi dengan tujuan untuk berbagi praktik terbaik tentang kemajuan budaya di seluruh dunia, mengidentifikasi para pelaku dan pemangku kepentingan, serta membuat agenda dan rencana aksi bersama untuk sepuluh tahun ke depan.

Forum yang baru pertama kali diselenggarakan ini mengundang ahli dan praktisi kebudayaan seperti Harry Waluyo, *Global Network of Facilitator for ICH-UNESCO in the Asia-Pacific Region*; Daud Aris Tanudirjo, ahli Warisan Kebudayaan; Max Binur, Kurator Seni Budaya dan film dokumenter; Wafa Taftazani, *Country Strategic Partnership Manager* (Youtube), Google; dan masih banyak lagi.

Forum internasional ini dilaksanakan selama empat hari, dan dibuka dengan perbincangan inspiratif mengenai tema “Memajukan Budaya, Membentuk Kembali Masa Depan”. Sepanjang empat hari pelaksanaan, IFAC diisi dengan enam subtema yaitu: 1) Berbagi Sejarah, Melindungi Keanekaragaman Budaya; 2) Memanfaatkan Big Data, Membina Praktik Budaya; 3) Festival sebagai Metode: Jejaring Aksi; 4) Membawa

Orang Kembali: Sebuah Kasus untuk Pembuatan Kebijakan Populer dalam Budaya; 5) Ekonomi Berbasis Budaya di Era Revolusi Industri 4.0; dan 6) Kesejahteraan untuk Semua: Menuju Hak Dasar Universal untuk Kebahagiaan.

Berbagi Sejarah, Melindungi Keanekaragaman Budaya

Tidak ada agenda pelestarian warisan budaya yang bisa dilakukan tanpa melibatkan peran aktif masyarakat dan kerja sama antar kelompok sosial. Berbagai kendala bermula dari dinamika antara pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan budaya. Sangat penting untuk mengatasi hambatan ini sehingga setiap pelestarian budaya dan warisan dapat menjadi dasar untuk melindungi dan memperkaya keanekaragaman budaya. Karena itu, pada subtema ini membicarakan bagaimana praktik baik dan menjawab tantangan dalam pengelolaan warisan budaya benda dan tak benda, serta peran yang diharapkan dari IFAC dalam mengawasi agenda dalam pengelolaan warisan budaya benda dan tak benda berdasarkan upaya masyarakat untuk memperkaya keragaman budaya.

IFAC adalah forum internasional yang bersifat *people-to-people* untuk memperkuat upaya global dalam pengarusutamaan budaya dengan penekanan khusus pada dampak kebudayaan terhadap kesejahteraan.

Memanfaatkan Big Data, Membina Praktik Budaya

Big data, algoritma, dan pembelajaran mesin semakin menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan berbudaya. Melalui media digital, produk budaya dapat diterima masyarakat dengan dimediasi oleh algoritma yang didukung oleh big data dan pembelajaran mesin, sehingga timbul kepentingan untuk memeriksa sejauh mana ilmu

Dalam IFAC, ahli budaya, komunitas budaya, aktivis budaya, seniman, dan sektor swasta merencanakan langkah yang tepat untuk memajukan budaya dalam semangat pengarusutamaan budaya, untuk mencapai hasil akhir yaitu kesejahteraan.

data diberdayakan dalam membuat kebijakan budaya dan praktik budaya di masyarakat. Subtema ini mengeksplorasi Praktik terbaik menggunakan ilmu data dalam praktik budaya dan pembuatan kebijakan budaya, tentang kedaulatan data dan kemandirian budaya di zaman algoritma, mengidentifikasi aktor dan pemangku kepentingan yang berfungsi mengakomodasi hubungan antara sains, teknologi, dan budaya.

Festival sebagai Metode: Jejaring Aksi

Festival bukan hanya serangkaian pertunjukan seni dan budaya. Apalagi festival adalah bagian dari proses konsolidasi pengetahuan budaya. Festival ini juga merupakan ruang budaya inklusif di mana orang berbaur tanpa memperhatikan hierarki sosial dan bebas untuk mengambil bagian dalam ekspresi budaya. Namun, pelembagaan festival sebagai peristiwa reguler berisiko mengurangi aspek transformatif festival sebagai metode perubahan sosial. Tantangan ‘festivalisme’ muncul di hadapan masyarakat di mana begitu banyak festival diadakan namun tidak memberikan dampak yang nyata pada masyarakat. Selain itu, festival diharapkan dapat menghadirkan kerangka kerja untuk aktivisme budaya baru, karena festival memainkan peran penting dalam membangun jaringan aktivisme budaya lintas batas. Praktik terbaik dan tantangan mengelola festival seni dan budaya sebagai metode perubahan sosial, dikupas lebih lanjut dalam subtema ketiga ini.

Membawa Masyarakat Kembali: Sebuah Kasus untuk Pembuatan Kebijakan Populer dalam Budaya

Indonesia memiliki tradisi tertentu yang disebut demokrasi deliberatif atau musyawarah mufakat, di mana orang terus berdiskusi sampai ada pendapat bersama,

tanpa melalui mekanisme pemungutan suara. Namun, perencanaan publik berdasarkan proses musyawarah masih memiliki masalah. Selain menghabiskan banyak waktu dan energi, proses ini tidak dengan sendirinya menjamin untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi karena di balik kesetaraan pendapat dapat mengintai fakta intimidasi sosial. Di sinilah budaya memainkan peran penting. Subtema ini mendalami praktik terbaik dan perencanaan populer berbasis pendekatan musyawarah dan pendekatan budaya.

Ekonomi Berbasis Budaya di Era Revolusi Industri 4.0

Penciptaan, produksi, penyebaran, transmisi, dan konsumsi adalah lima tahapan dalam siklus ekonomi budaya UNESCO. Pada subtema kelima ini IFAC memeriksa sejauh mana relevansi siklus ini dalam nilai ekonomi budaya di era Revolusi Industri 4.0. Praktik terbaik dalam mengelola ekonomi budaya berdasarkan pendekatan rantai nilai, membahas masalah ketergantungan dan hubungan asimetris dalam rantai nilai ekonomi budaya global, serta mengidentifikasi aktor dan pemangku kepentingan dalam menciptakan rantai nilai ekonomi budaya yang ideal akan dikaji lebih dalam.

Kesejahteraan untuk Semua: Menuju Hak Dasar Universal untuk Kebahagiaan

“Bagaimana kita memastikan bahwa kebahagiaan dapat diakses oleh semua orang?” Ini adalah tantangan bagi pemerintah dan masyarakat karena bukan hanya kekayaan, kebahagiaan adalah tujuan dari pembangunan dan semua upaya sosial. Banyak ahli berbicara tentang pendapatan dasar universal sebagai kerangka kerja baru untuk kesejahteraan sosial. Namun, jika tujuan pembangunan adalah kebahagiaan, maka *universal basic income*



atau pendapatan dasar universal tidak memadai.

Jika demikian, gagasan tentang pendapatan dasar universal harus diperkuat oleh agenda untuk kebahagiaan dasar universal. Di sini budaya, sebagai akar dan faktor penentu kebahagiaan, memainkan peran sentral. Oleh karena itu, pertanyaannya menjadi, "Apa jenis desain dan kebijakan budaya yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebahagiaan mereka di dunia ini? Apa yang menjamin bahwa kebahagiaan seseorang tidak mengganggu kebahagiaan orang lain?".

Untuk menjawab pertanyaan tersebut pada subtema keenam inilah para ahli dan peserta IFAC memperdalam praktik terbaik inisiatif publik dan kebijakan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan tantangan untuk mencapai kesejahteraan universal berdasarkan inisiatif publik dan kebijakan budaya.

Hasil dari IFAC

Tidak hanya merencanakan langkah yang tepat memajukan budaya dalam semangat pengarusutamaan budaya, hasil juga harus dipikirkan. Hasilnya yaitu kesejahteraan untuk semua umat manusia hingga seluruh anggota biosfer. Hal ini dapat disebut juga sebagai kesejahteraan universal dan inklusif. Ini adalah tujuan dari semua strategi perkembangan yang juga merupakan tujuan tertinggi dari setiap upaya dalam semangat kemajuan dan pengarusutamaan budaya.

Agenda bersama dan rencana tindakan yang dihasilkan oleh IFAC dalam perencanaan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai target 2030 akan dikembangkan sebagai masalah utama yang dieksplorasi oleh WCF 2020 yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan. Dalam hal ini, hasil dari IFAC akan memandu agenda global pengarusutamaan budaya. (INT, Sumber: <https://www.ifac-wcf.or.id>)

Belajar Akuntansi melalui Komik Digital

Lingkungan belajar yang mendukung menjadi kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sekolah harus merancang metode pembelajaran yang efektif yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap peserta didik. Penelitian ini melihat sejauh mana metode pembelajaran dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Hal ini penting untuk diketahui karena metode yang tepat akan membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien.

Oleh:

Yuliana, Siswandari, Sudyanto

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta

MENURUT RUSMAN, Kurniawan, & Riyana (2012) Komponen-komponen yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya adanya tujuan pembelajaran, bahan pelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran efektif berorientasi pada keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan/informasi pembelajaran kepada peserta didik.

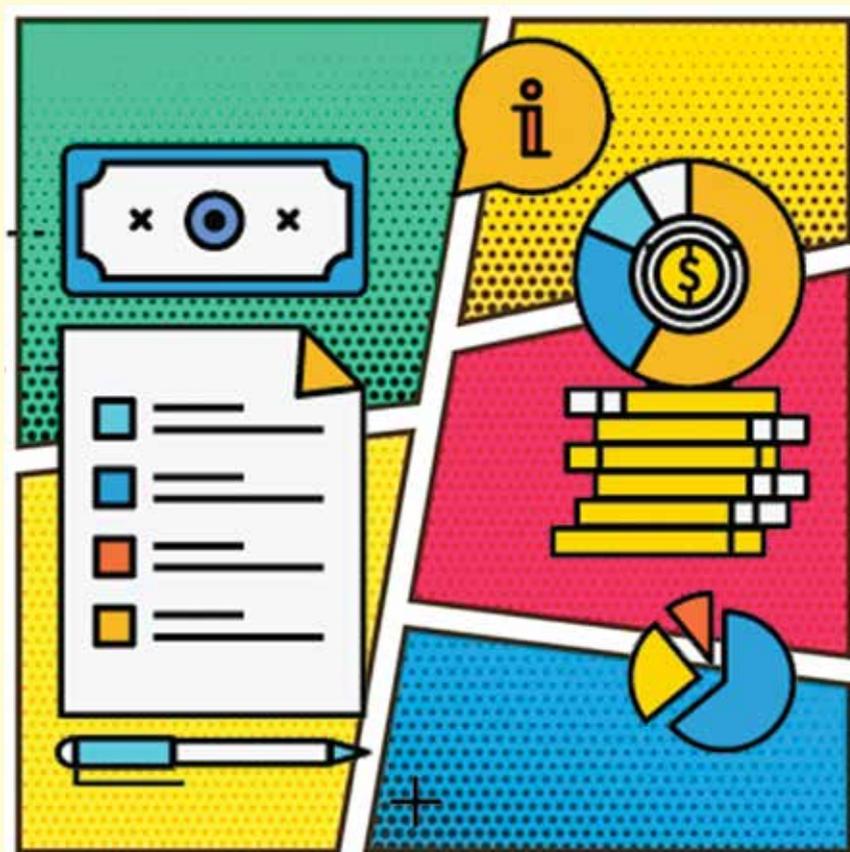
Karakteristik dan gaya belajar siswa yang berbeda perlu dipertimbangkan dalam menentukan media yang akan digunakan dalam belajar. Multimedia sebagai salah satu media pembelajaran, merupakan integrasi dari beberapa jenis media dan teknologi. Penggunaan multimedia dalam penyusunan materi akuntansi di SMK 3 Gemolong ini misalnya, dapat kita gunakan sebagai inspirasi untuk mengembangkan komik digital sebagai

media untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.

Penggunaan Komik Digital

Komik merupakan salah satu jenis bacaan yang banyak digemari. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang pernah dilakukan di SMK 3 Gemolong, tercatat sebesar 86,36% siswa senang membaca komik atau cerita bergambar. Komik yang sangat digemari siswa ini dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Menurut Mcloud dalam Negerete (2013) penggunaan komik dalam proses pembelajaran memberikan kontribusi tinggi terhadap daya ingat dan memori jangka panjang siswa.

Pengertian komik digital menurut Lamb & Johnson (2009) merupakan komik sederhana yang disajikan dalam media elektronik tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komik digital merupakan suatu bentuk cerita bergambar dengan tokoh karakter tertentu yang menyajikan informasi atau pesan melalui media elektronik.



Penyajian komik yang berbasis elektronik memungkinkan guru dapat membuat cerita komik lebih menarik dengan menambahkan unsur animasi dan suara dalam penyajiannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Yang & Wu (2011), penggunaan komik digital dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai isi pelajaran, menambah keinginan siswa dalam mengeksplorasi dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Harapannya, pembelajaran melalui komik digital akan lebih mudah dipahami siswa sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran komik digital akuntansi pada materi penyusunan laporan rekonsiliasi bank yang akan digunakan siswa SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Hasilnya, diperoleh fakta bahwa penggunaan buku paket yang belum optimal tidak diimbangi dengan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan banyak siswa yang

merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti pelajaran akuntansi.

Kenyataan tersebut diakui guru karena adanya keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki sekolah, termasuk lemahnya kompetensi guru dalam menyusun dan mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Selama ini, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam proses pembelajaran hanya terbatas pada media visual berupa *powerpoint* yang menampilkan materi dalam bentuk *personal presentation*. Berdasarkan temuan di lapangan, komik digital perlu dikembangkan dalam pembelajaran akuntansi di sekolah.

Sajian Video Animasi

Dalam menyusun desain produk awal media terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yakni menetapkan standar kompetensi yang akan dikembangkan dalam media komik digital akuntansi. Kemudian dipilihlah kompetensi dasar untuk menyusun laporan rekonsiliasi bank, berdasarkan hasil analisis

kebutuhan siswa yang telah dilakukan sebelumnya. Konten dan isi media komik digital ini akan membahas materi mengelola administrasi kas bank, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk *flowchart* dan *story board*. Materi tersebut akan disajikan dalam video animasi yang terdiri dari tiga bagian.

Pertama, bagian pendahuluan (*introduction*) yang akan menyajikan informasi awal mengenai konsep pengelolaan kas perusahaan. Kedua, bagian komik digital (*digital comic*) akan menyajikan proses menyusun laporan rekonsiliasi yang disajikan dalam sebuah cerita komik. Ketiga, bagian latihan (*drill and practice*) akan menampilkan pertanyaan mengenai proses penyusunan laporan rekonsiliasi untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan.

Beberapa aplikasi yang dipergunakan dalam mengembangkan media komik digital akuntansi, meliputi CorelDraw X5, Sparkol Videoscribe, Videopad, dan Articulate Storyline. Kemudian, draf validasi desain dilakukan penilaian kelayakan produk. Penilaian kelayakan komik digital akuntansi dilakukan oleh tim ahli (*expert judgement*) yang terdiri dari ahli media, ahli materi, ahli bahasa, dan praktisi (guru akuntansi di sekolah).

Berdasarkan hasil validasi ahli, secara keseluruhan materi pada komik digital akuntansi dikategorikan layak untuk diujicobakan dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran komik digital akuntansi disajikan dalam bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami siswa.

Tahap selanjutnya, komik digital diujicobakan kepada 10 siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Hasilnya, rata-rata sebesar 82,71% siswa memberikan

penilaian sangat baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan komik digital akuntansi dalam proses pembelajaran memperoleh tanggapan positif dari siswa dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran akuntansi.

Siswa Antusias

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi guru yang dibutuhkan saat ini tidak hanya sebatas mampu menguasai materi pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dalam mendukung keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, seorang guru juga harus menjadi individu yang mengenal karakteristik peserta didik dan giat dalam berinovasi mengembangkan materi pembelajaran.

Penyajian materi yang lebih menarik dengan memadukan berbagai unsur gambar, narasi dan animasi, terbukti efektif dalam meningkatkan antusiasme siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Sehingga siswa lebih konsentrasi dan aktif dalam belajar.

Perlu Dukungan Berbagai Pihak

Dukungan kepala sekolah dan *stakeholder* juga diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi guru melalui berbagai pelatihan dan memberikan sarana pendukung dalam mengimplementasikan media pembelajaran komik digital sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Pengembangan media komik digital masih perlu dikembangkan supaya tidak hanya disajikan dalam laptop/ komputer, namun dapat disajikan dalam bentuk *mobile phone* maupun android, sehingga lebih praktis dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Karena, belajar yang digagas dalam suasana menyenangkan akan lebih indah untuk dikenang. (DLA)

Selama ini, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi hanya terbatas pada media visual berupa *powerpoint* yang menampilkan materi dalam bentuk *personal presentation*. Berdasarkan temuan di lapangan, komik digital perlu dikembangkan dalam pembelajaran akuntansi di sekolah.

Mari Cermati Lagi Penggunaan Huruf Kapital

Sahabat Jendela, tidak jarang di antara kita kurang memperhatikan kaidah penggunaan huruf kapital dalam penulisan kata maupun kalimat. JENDELA edisi kali ini mengulas tentang cara penggunaan huruf kapital dengan benar. Yuk simak bersama!



1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya:
 - *D*ia membaca buku.
2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya:
 - *D*ewi Sartika
3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung.

Misalnya:

 - Adik bertanya, "*K*apan kita pulang?"
 - "*M*ereka berhasil meraih medali emas," katanya.
4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan

Misalnya:

 - *S*lam
 - *A*lquran
 - *K*risten
5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang.

Misalnya:

 - *S*ultan Hasanuddin
 - *A*gung Permana, *S*arjana *H*ukum
6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan.

Misalnya:

 - *T*erima kasih, *K*iai.
 - *S*ilakan duduk, *P*rof.
7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat.

Misalnya:

 - *P*roklamator Republik Indonesia (Soekarno-Hatta)
 - *S*ekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa.

Misalnya:

 - *b*angsa *I*ndonesia
 - *b*ahasa *B*ali
9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya.

Misalnya:

 - tahun *H*ijriah
 - bulan *A*gustus
10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya:
 - *K*onferensi *A*sia *A*frika
11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi.

Misalnya:

 - *J*akarta
 - *A*sia *T*enggara
12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama negara, lembaga, pemerintah, badan, organisasi, atau dokumen.

Misalnya:

 - *R*epublik *I*ndonesia
 - *M*ajelis *P*ermusyawaratan *R*akyat *R*epublik *I*ndonesia
13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata (termasuk unsur kata ulang sempurna) di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar.

Misalnya:

 - *S*aya telah membaca buku *D*ari *A*ve *M*aria ke *J*alan *L*ain ke *R*oma.
 - *T*ulisan itu dimuat dalam majalah *B*ahasa dan *S*astra.
14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan.

Misalnya:

 - *S.H.* = sarjana hukum
 - *S.K.M.* = sarjana kesehatan masyarakat
15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti *bapak*, *ibu*, *kakak*, *adik*, dan *paman*, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan.

Misalnya:

 - "*K*apan *B*apak berangkat?" tanya Hasan. Dendi bertanya, "*I*tu apa, *B*u?"
 - "*S*ilakan duduk, *D*ik!" kata orang itu.
16. Huruf kapital sebagai huruf pertama kata ganti *Anda* ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya:
 - *S*udahkah *A*nda tahu?
 - *S*iapa nama *A*nda?

Senarai Kata Serapan



Pada edisi kali ini, JENDELA kembali menghadirkan daftar kata serapan yang diserap dari berbagai bahasa di dunia. Penyerapan kata dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia merupakan salah satu upaya memperkaya khasanah bahasa Indonesia.

BENTUK SERAPAN	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI KATA
mantra	ajian	Jawa Kuna	Perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib (misalnya dapat menyembuhkan, mendatangkan celaka, dan sebagainya).
makalah	maqalaturun	Arab	Tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi.
es	ijs	Belanda	Air membeku, air membatu.
dosen	docent	Belanda	Tenaga pengajar pada perguruan tinggi.
balon	balloon	Inggris	Bola atau pundi-pundi besar dibuat dari karet (kertas, kain, dan sebagainya) yang diisi udara (gas yang ringan).
indra	indriya	Sanskerta	Alat untuk merasa, mencium bau, mendengar, melihat, meraba, dan merasakan sesuatu secara naluri (intuitif) usulkan makna baru.
opelet	klein busje	Belanda	Mobil sedan yang susunan tempat duduknya diubah dan disesuaikan sebagai kendaraan umum yang ditambahkan.
domisili	domicilium	Latin	Tempat kediaman yang sah dari seseorang; tempat tinggal resmi.
bangku	banco	Portugis	Papan dan sebagainya (biasanya panjang) berkaki untuk tempat duduk.
kartu	kaart	Belanda	Kertas tebal, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, hampir sama dengan karcis).



Jika Anda membutuhkan layanan informasi mengenai pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampaikan melalui kanal-kanal berikut:

**Unit Layanan Terpadu (ULT)
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan**



Telepon : 021 570 3303
021 5790 3020
0812 976 929

Faksimile: 021 573 3125



Laman:
ult.kemdikbud.go.id

Alamat :
Gedung C Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Waktu Pelayanan



Pendaftaran	: 08.00 – 11.00 WIB
Senin – Kamis	: 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat	: 12.00 – 13.00 WIB
Jumat	: 09.00 – 15.30 WIB
Istirahat	: 11.30 – 13.30 WIB



Unduh aplikasi

**Majalah
Jendela**

Temukan di
 **Google Play**

myedisi

<http://bit.ly/majalahjendela>

 jendela.kemdikbud.go.id

 kemdikbud.go.id

 [Majalah Jendela Dikbud](#)

Dapat dibaca juga melalui





KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Selamat dan Sukses
atas Penyelenggaraan



Pekan Kebudayaan Nasional

7 s.d 13 Oktober 2019 di Istora Senayan, Jakarta



#indonesiabahagia
#pkn2019
#budayasaya

ISSN: 2502-7867



9 772502 786065

